



SKRIPSI

**EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA**

*THE EXISTANCE OF POLICE AS LAW ENFORCER IN
GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN INDONESIA*

**OLEH:
OKKY PRASTYO AJIE**

NIM. 070710101097

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA**

***THE EXISTANCE OF POLICE AS LAW ENFORCER IN
GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN INDONESIA***



OKKY PRASTYO AJIE

NIM 070710101097

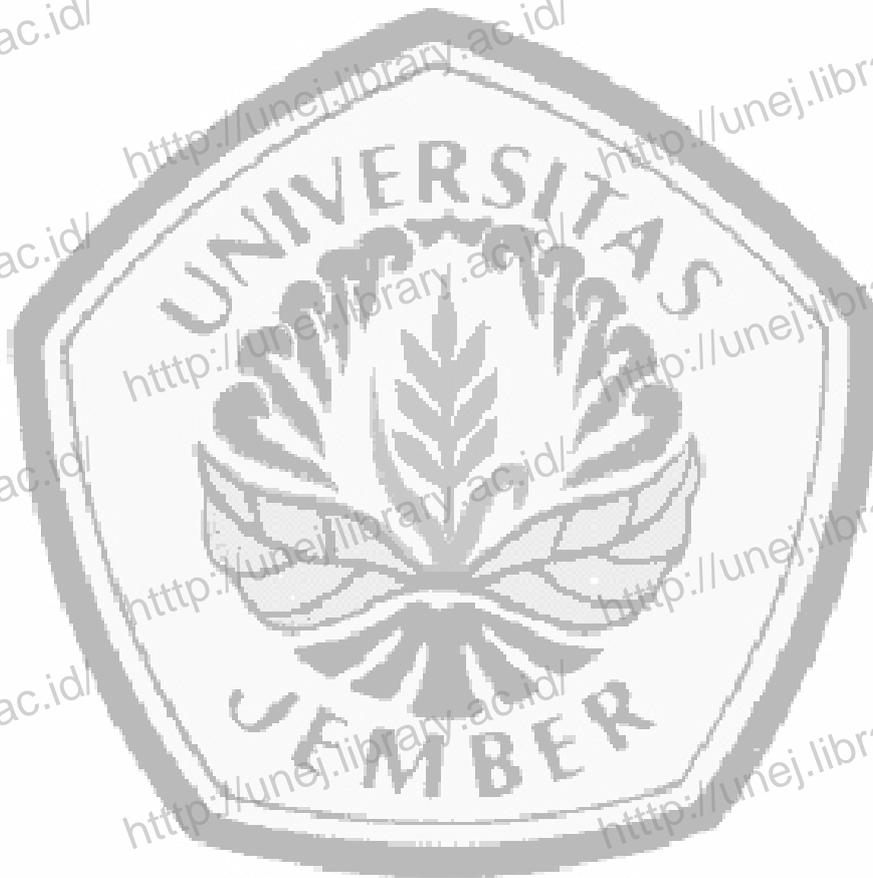
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Semua orang dapat membuat kesalahan; Kebanyakan orang terdoda untuk membuat kesalahan karena pengaruh nafsu dan kepentingan pribadi”

(John Lock)*



* Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Okky Prastyo Ajie

Nim : 070710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2012

Yang menyatakan,

Nama : Okky Prastyo Ajie.

NIM : 070710101097

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Bambang Tri Anggono dan Ibunda Nanik Dyah Wahyuningsihah
2. Kakakku tersayang Boney Tegar Prasajo
3. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Guru-guruku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup



HALAMAN PERSYARATAN GELAR
EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA

THE EXISTANCE OF POLICE AS LAW ENFORCER IN
GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

OKKY PRASTYO AJIE

NIM 070710101097

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal 11 Oktober 2012

Oleh
Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA**

Oleh

OKKY PRASTYO AJIE

070710101097

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 195701221982031002

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 (dua puluh dua)
Bulan : Oktober
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. :

NIP. 195701221982031002

ROSITA INDRAYATLS.H., M.H. :

NIP. 197805312005012001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati.S.H., M.H. Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.;
4. Sekretaris Panitia Penguji Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H.;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak A'an Efendi S.H., M.H., yang telah mau menyisihkan waktu dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Bambang Tri Anggono dan Ibunda Nanik Dyah Wahyuningsih yang telah memberikan semua kasih dan sayang untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Kakak ku tersayang Boney Tegar Prasajo;
13. Semua keluarga dan cucu-cucu dari almarhum mbah Soedarmo dan almarhum mbah Hartoyo;
14. Teman-teman yang telah menjadi keluarga baru ku yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini: Nindya, Ayu, Dewi dan Etis. Akhirnya aku bisa mengikuti jejak kalian menjadi seorang Sarjana Hukum;
15. Para sahabat yang selalu memberikan tawa dan gairah masa muda: Babi, Nandu, Imron, Dhana, Pengkol, Nduk. Selalu semangat dan pantang putus asa dalam mengejar mimpi kalian masing-masing, dan semoga kalian secepatnya lulus dan bisa membanggakan orang-orang yang mencintai kalian.
16. Adik-adikku Tersayang di Janter: Ekky, Kunny, Chika, Ulfa, Galang, Enjang, Dika, Dewi, Rizka, Dinda, Fifin, Yudhis, Feby, Farid, Aulia, Hepi, Dian, Kevin, Deni, Nia, Indra, Anti, Nanda, Lia, Hana dan Ardhita. Walaupun kita jarang berkumpul tapi aku percaya kalian bisa terus berkarya dan bersinar terang dengan ide-ide kalian yang brilian. Tapi jangan lupa kuliah tetap nomer satu. SALAM BUDAYA;

17. Junior di Fakultas Hukum yang selalu memberikan cambukan semangat agar aku bisa cepat lulus: Nurna, Firda, Maya, Arsyi, Novan, Ndut, Sandy, Novan, Tarjo, Sulung, Depok, dan maaf bagi yang belum disebut.

18. Teman-teman Fakultas Hukum : Sofyan, Nosa, Yudha, Arman, Arief, Abi, Bobby, Fikar, Hendra, Iwan, Husein dan semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta, merasa terhormat kenal dengan kalian;

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Oktober 2012

Penulis



RINGKASAN

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, karena kepolisian merupakan lembaga hukum yang hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi. Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistim pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpihak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “EKSISTENSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”. Selanjutnya dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni : Pertama, bagaimanakah fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dalam penegakan hukum. Kedua, bagaimanakah eksistensi kepolisian dalam konsep pembagian kekuasaan negara dan menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, bagaimanakah keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, memberikan sumbangan pikiran khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat yang dapat berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum, dan almamater. Adapun tujuan khususnya yakni Untuk mengetahui fungsi kepolisian sebagai penegak hukum,

Untuk mengetahui eksistensi kepolisian dalam konsep pembagian kekuasaan negara dan menurut UUD 1945, dan Untuk mengetahui keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip pemerintahan yang baik. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan per Undang-Undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pembagian kekuasaan negara, mengenai kepolisian yang meliputi pengertian polisi dan kepolisian, mengenai konsep penyelenggaraan kepolisian, dan mengenai penegak hukum yang meliputi pengertian penegak hukum, pengertian penegakan hukum, dserta mengenai prinsip pemerintahan yang baik yang meliputi pengertian prinsip pemerintahan yang baik, ciri-ciri dan karakteristik pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pembahasan, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta di zaman sekarang polisi dituntut untuk menjadi polisi protagonis, yang artinya polisi harus mampu membaca perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat berakaitan dengan rasa aman dan tertib serta kebutuhan ditegakkannya hukum manakala terjadi pelanggaran hukum. Pada skripsi ini juga penulis tertarik untuk membahas hubungan lembaga kepolisian dengan lembaga-lembaga lain dalam konsep pembagian kekuasaan yang di dasarkan atas tugas dan wewenang baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Penulis pada skripsi ini juga tertarik untuk membahas hal mendasar keterkaitan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan prinsip pemerintahan yang baik adalah melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang.

Bedasarkan penjelasan tersebut penulis memberikan saran agar pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan kepolisian di bawah Presiden. Perlu dibentuk Lembaga Pengawas Kepolisian yang kedudukannya di luar struktur lembaga kepolisian yang bersifat independen, serta Perlunya membentuk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dalam penyelenggaraan kepolisian yang pendekatannya pada perlindungan hak asasi anggota Polri.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pembagian Kekuasaan Negara.....	11
2.2 Kepolisian	13
2.2.1 Pengertian Polisi dan Kepolisian	13
2.2.2 Konsep Penyelenggaraan Kepolisian.....	15
2.3 Penegak Hukum	18
2.3.1 Pengertian Penegak Hukum	18
2.3.2 Pengertian Penegakan hukum	19

2.4 Prinsip Pemerintahan yang Baik	20
2.4.1 Pengertian Prinsip Pemerintahan yang Baik	20
2.4.2 Ciri-ciri dan Karakteristik Pemerintahan yang Baik	21
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum	25
3.2 Eksistensi Kepolisian dalam Konsep Pembagian Kekuasaan Negara dan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
3.2.1 Eksistensi Kepolisian dalam Konsep Pembagian Kekuasaan Negara	29
3.2.2 Eksistensi Kepolisian Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002	41
3.3 Keterkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Prinsip Pemerintahan yang Baik	45
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	

